

Transportasi Publik Dan Kesenjangan Sosial Di Masyarakat Kota Makassar

Muh. Watif M.¹, A. Sahsa Amelia Kartika², Naia Dwi Revalin³, Friska Ananda Jamaruddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar

E-mail: watifmuhammad@gmail.com¹, asahsaameliakartika@gmail.com²,
nayaadwii12@gmail.com³, Friskaananda8148@gmail.com⁴

Article History:

Received: 27 Mei 2025

Revised: 05 Juni 2025

Accepted: 15 Juni 2025

Keywords:

Kesenjangan Sosial, Transportasi, Pelayanan Publik, Kota Makassar

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai dinamika sosial yang terjadi di Kota Makassar dengan meninjau literatur dari dua belas jurnal ilmiah yang membahas isu transportasi, urbanisasi, pelayanan publik, transformasi pekerjaan, serta kesenjangan sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan tematik. Hasil analisis menunjukkan bahwa urbanisasi yang pesat di Kota Makassar tidak selalu diikuti oleh pemerataan pembangunan dan akses layanan publik, sehingga memunculkan berbagai bentuk ketimpangan sosial. Masalah transportasi, pengelolaan anak jalanan, aksesibilitas bagi disabilitas, hingga dampak transformasi digital terhadap pasar kerja memperjelas adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan inklusif dan kolaboratif dalam menanggulangi masalah sosial yang kompleks dan saling berkaitan di wilayah perkotaan seperti Makassar.

PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan salah satu solusi strategis dalam mengatasi permasalahan transportasi yang kompleks di kota-kota besar. Pemanfaatan moda transportasi publik tidak hanya mampu menurunkan tingkat kemacetan, tetapi juga berkontribusi dalam pengurangan kadar polusi udara serta efisiensi penggunaan bahan bakar, sehingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Ladayya, Siregar, Pranoto, & Muchtar, 2022). Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara menyeluruh apabila sistem transportasi publik dikelola secara inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks pembangunan kota, akses terhadap transportasi menjadi indikator penting dari keadilan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, kesenjangan sosial adalah kondisi ketidaksetaraan yang mencolok dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan mobilitas sosial. Kesenjangan ini menciptakan jurang pemisah antara masyarakat dari kelas sosial yang berbeda, di mana kelompok ekonomi bawah cenderung mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan (Aisyah, 2023).

Ketika layanan transportasi publik tidak terdistribusi secara adil, kelompok rentan dan miskin akan semakin terpinggirkan dan kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara transportasi publik dan kesenjangan sosial menjadi persoalan yang penting untuk dikaji dalam konteks kota-kota yang tengah berkembang pesat.

Kota Makassar, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia timur dan keempat terbesar di Indonesia secara keseluruhan, dengan luas wilayah mencapai 175,77 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.423.877 jiwa pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta menandakan pentingnya perencanaan perkotaan, termasuk sistem transportasi yang memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat kota (BPS, 2021).

Pertumbuhan pesat Kota Makassar sebagai pusat urbanisasi dipengaruhi oleh meningkatnya daya tarik ekonomi kota ini. Mobilitas masyarakat dari luar daerah ke Makassar terus meningkat karena tersedianya peluang kerja dan pengembangan sektor industri, yang menjadikan kota ini sebagai tujuan utama urbanisasi. Urbanisasi ini mendorong konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan yang pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap infrastruktur dan fasilitas kota, termasuk transportasi publik (Syamsu Rijal & Thamrin Tahir, 2022).

Sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, transportasi menjadi salah satu elemen vital dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Makassar menyediakan berbagai moda transportasi seperti bus kota, angkutan kota (pete-pete), dan ojek online. Namun demikian, keberadaan transportasi publik ini belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat di wilayah pinggiran atau berpenghasilan rendah. Akibatnya, banyak warga yang lebih memilih menggunakan ojek online karena dianggap lebih cepat dan fleksibel, meskipun tidak semua memiliki akses terhadap teknologi pendukungnya (St Maryam & Syarkawi, 2022).

Pertumbuhan dan pembangunan Kota Makassar secara fisik memang terlihat berjalan lancar dan bahkan menjadi kebanggaan nasional. Akan tetapi, di balik kemajuan tersebut, terdapat fenomena kesenjangan sosial yang cukup tajam. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur modern, masih banyak ditemukan kelompok masyarakat miskin yang hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan dan akses terhadap layanan dasar, termasuk transportasi publik (Jannah, Tompo, & Sore, 2022).

Secara konseptual, kesenjangan sosial ekonomi mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, penghasilan, serta layanan sosial antara kelompok masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam konteks perkotaan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan mobilitas sosial warga kota. Di Makassar, ketimpangan ini tercermin dari akses yang tidak merata terhadap transportasi publik yang seharusnya menjadi sarana utama mobilitas masyarakat lintas kelas sosial (Sebyar & Wulandari, 2023).

Sebagai kota metropolitan baru yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Kota Makassar diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan wilayah metropolitan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, memperkuat integrasi antarwilayah, serta mengurangi kesenjangan sosial dan spasial. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dasar seperti transportasi publik yang inklusif dan merata menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mencapai keadilan sosial di perkotaan (Pratiwi, A. S, & Nikensari, 2024).

Kajian tentang transportasi publik dan kesenjangan sosial di Kota Makassar menjadi semakin mendesak di tengah pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk kota. Ketika

jumlah penduduk meningkat dan tekanan terhadap ruang kota semakin besar, infrastruktur dasar seperti transportasi publik harus mampu mengimbangi kebutuhan mobilitas seluruh lapisan masyarakat. Namun realitanya, belum semua warga memiliki akses yang merata terhadap layanan tersebut, terutama masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah pinggiran. Ketimpangan ini memperbesar risiko eksklusi sosial, mempersempit akses ekonomi, dan pada akhirnya menghambat terciptanya kehidupan kota yang inklusif. Oleh karena itu, menyoroti isu ini saat ini sangat relevan untuk menanggulangi dampak sosial dari pembangunan kota yang tidak merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis hubungan antara transportasi publik dan kesenjangan sosial di Kota Makassar. Studi literatur merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, laporan resmi, buku, artikel, maupun dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun pemahaman konseptual dan kontekstual secara mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, sekaligus mengidentifikasi pola, temuan-temuan sebelumnya, dan celah penelitian.

Langkah awal dalam metode ini dimulai dengan identifikasi topik dan ruang lingkup kajian, yakni fokus pada peran transportasi publik dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan bagaimana distribusinya dapat memengaruhi tingkat kesenjangan sosial. Setelah topik dirumuskan secara spesifik, peneliti melakukan pencarian data sekunder melalui berbagai database akademik nasional dan internasional, seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, serta repositori perguruan tinggi yang menyediakan artikel terkait Kota Makassar, transportasi publik, dan kesenjangan sosial. Kriteria pemilihan literatur difokuskan pada publikasi ilmiah dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2024) guna memastikan aktualitas data, kecuali pada beberapa sumber dasar yang dianggap penting secara konseptual. Literatur yang dipilih juga diseleksi berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas sumber, serta kesesuaian dengan konteks lokal Makassar. Beberapa dokumen yang dianalisis antara lain laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil penelitian dari jurnal terakreditasi, serta kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan presiden atau peraturan daerah.

Setelah data literatur terkumpul, dilakukan proses analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasi informasi secara kritis. Peneliti mengkaji bagaimana literatur tersebut menjelaskan keterkaitan antara sistem transportasi publik, mobilitas masyarakat, dan ketimpangan akses terhadap layanan transportasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial tertentu di Makassar. Analisis ini juga memperhatikan dinamika urbanisasi, perkembangan ekonomi kota, dan intervensi kebijakan publik sebagai variabel-variabel penting dalam memahami konteks kesenjangan sosial. Metode studi literatur ini dipilih karena sesuai untuk menggali permasalahan sosial dengan pendekatan konseptual dan deskriptif, terutama pada isu-isu yang kompleks dan saling berkelindan seperti transportasi dan ketimpangan sosial. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun dasar teoritis dan argumentatif yang kuat sebelum melangkah ke tahapan penelitian lapangan yang bersifat empiris di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap dua belas jurnal yang dianalisis, tampak bahwa Kota Makassar menghadapi berbagai persoalan multidimensional yang saling berkaitan erat: urbanisasi, transformasi pekerjaan, pelayanan publik, transportasi, dan secara lebih mendasar—kesenjangan sosial. Proses urbanisasi yang terus meningkat di Kota Makassar membawa implikasi besar terhadap tata kelola kota dan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, urbanisasi mendorong

.....

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur, namun di sisi lain juga memperbesar jurang kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mereka yang termarginalkan dalam proses pembangunan.

Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan menyebabkan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik dan fasilitas transportasi. Beberapa wilayah pusat di Kota Makassar mendapatkan perhatian lebih besar dalam hal pengembangan infrastruktur dan transportasi, seperti implementasi layanan BRT Mamminasata, namun wilayah pinggiran cenderung terabaikan. Hal ini tercermin dari penelitian Rachman et al. (2025) dan Sari (2022) yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi kualitas layanan transportasi berdasarkan lokasi dan tingkat ekonomi pengguna. Ketimpangan ini memperdalam segregasi spasial dalam kota—di mana masyarakat dengan pendapatan rendah terpaksa tinggal di daerah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap layanan dasar.

Kesenjangan sosial juga tampak jelas dalam studi Susilawati et al. (2023) yang menyoroti keterbatasan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas. Kota Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip inklusivitas dalam pelayanan publik, yang menunjukkan adanya diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan. Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian Sakir et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa anak jalanan di Makassar belum mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang memadai karena ketiadaan fasilitas rehabilitasi. Padahal mereka merupakan dampak langsung dari kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial yang melekat di perkotaan.

Kesenjangan sosial tidak hanya tampak dalam akses fisik terhadap layanan, tetapi juga dalam aspek pekerjaan. Transformasi digital yang dijelaskan oleh Munawati et al. (2024) telah menciptakan pasar kerja yang menuntut keterampilan baru, seperti literasi digital dan kemampuan analitis. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan atau pelatihan teknologi tertinggal jauh dalam kompetisi ini. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan kerja formal, tetapi juga terjebak dalam pekerjaan informal atau rentan seperti pengamen jalanan, ojek daring tanpa perlindungan sosial, atau bahkan kembali ke jalanan sebagai bentuk bertahan hidup. Hal ini memperjelas bahwa digitalisasi tidak otomatis membawa kesejahteraan merata, melainkan memperbesar kesenjangan antara kelompok yang "melek teknologi" dengan yang tidak.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya integrasi antara program sosial, pendidikan keterampilan, dan kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah masih cenderung menjalankan kebijakan sektoral yang belum menjangkau akar persoalan kesenjangan sosial. Ketimpangan pendapatan, perbedaan kualitas pendidikan, dan akses yang tidak merata terhadap layanan publik dan teknologi membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Jika tidak ada intervensi yang tepat dan terarah, jurang antara kelompok kaya dan miskin di kota akan semakin melebar, menciptakan risiko konflik sosial dan menurunnya kohesi sosial dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan semua temuan dari jurnal-jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama Kota Makassar bukan hanya pada peningkatan layanan transportasi atau efektivitas birokrasi publik semata, tetapi juga pada bagaimana mengatasi akar persoalan ketimpangan sosial yang kian nyata. Strategi penanganan masalah sosial dan pembangunan perkotaan harus diarahkan pada pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok rentan seperti anak jalanan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterampilan kerja rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital dan pelatihan vokasi berbasis teknologi harus menyasar kelompok marjinal agar transformasi digital tidak menjadi faktor eksklusif yang semakin memarginalkan sebagian masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam merancang masa depan kota yang berkeadilan

.....

sosial. Tanpa upaya yang serius untuk mengurangi kesenjangan sosial, potensi pembangunan Kota Makassar akan terus dibayangi oleh persoalan-persoalan struktural yang menghambat kesejahteraan kolektif masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap beberpa jurnal ilmiah, dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar tengah menghadapi persoalan multidimensi yang saling berkaitan erat, terutama dalam konteks urbanisasi yang tidak merata, transportasi publik yang belum inklusif, serta pelayanan sosial yang belum menyentuh kelompok rentan secara optimal. Kesenjangan sosial menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai permasalahan tersebut. Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik memicu ketimpangan wilayah dan sosial; transformasi digital memperbesar jurang keterampilan; serta layanan publik dan sosial belum mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan anak jalanan. Secara keseluruhan, pembangunan di Makassar masih cenderung elitis dan eksklusif.

Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang inklusif dan berbasis data, khususnya dalam merespons dampak urbanisasi dan digitalisasi yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Pengembangan transportasi publik harus bersifat adil dan merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk daerah pinggiran dan kelompok berkebutuhan khusus. Peningkatan kualitas dan akses layanan sosial, termasuk pendidikan keterampilan kerja dan rehabilitasi anak jalanan, harus menjadi prioritas untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta) sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan sosial. Perlu adanya evaluasi dan penguatan regulasi daerah seperti Perda No. 2 Tahun 2008 agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan menjangkau kelompok sasaran secara menyeluruh.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, yaitu kepada institusi Universitas Negeri Makassar dan terkhusus pada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perkotaan yang telah memberikan banyak ilmu, dan masukkan sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik

DAFTAR REFERENSI

- Amaya, H., Andriani, Y., & Malik, S. (2024). Dampak Urbanisasi terhadap Kualitas Lingkungan di Kota Makassar. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 12(1), 33–48.
- Aisyah, N. N. (2023). Analisis Penyebab Serta Dampak Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Beserta Solusi Untuk Mengatasinya. *Proceedings Series of Educational Studies*, 231–234.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Daerah Kota Makassar Tahun 2021*. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Hidayat, R., Rahman, A., & Nursyam, H. (2021). Peran Pajak Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 221–230.
- Jannah, Y. M., Tompo, N., & Sore, U. B. (2022). Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, 1(2), 158–163. <https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1538>
- Ladayya, F., Siregar, D., Pranoto, W. E., & Muchtar, H. D. (2022). Analisis Sentimen pada Program Transportasi Publik JakLingko dengan Metode Support Vector Machine. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 6(2), 381–392.
- Munawati, M., Wahyuddin, W., & Marsuki, N. R. (2024). Transformasi Pekerjaan di Era Digital: Analisis Dampak Teknologi Pada Pasar Kerja Modern. *Concept: Journal of Social*

- Humanities and Education, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.950>
- Ni'am, M., Nurdin, M., & Yuniarti, F. (2024). Analisis Perbandingan Transportasi Konvensional dan Online di Kota Makassar. *Jurnal Transportasi dan Masyarakat*, 6(2), 45–58.
- Pratiwi, N., A. S, K. D., & Nikensari, S. I. (2024). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Unggulan Kota Makassar Sebagai Kota Metropolitan Baru di Kawasan Timur Indonesia. *ECo-Fin*, 6(2), 313–321. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1405>
- Rachman, A., Hafid, H., & Syarifuddin, S. (2025). Evaluasi Kinerja BRT Mamminasata dalam Program Teman Bus. *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 8(1), 10–24.
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.247>
- Sari, D. P. (2022). Persepsi Penumpang terhadap Kualitas Pelayanan Terminal Daya Kota Makassar. *Jurnal Infrastruktur dan Transportasi*, 5(2), 77–88.
- Sebyar, M. H., & Wulandari, M. A. (2023). Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Masyarakat Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Agrimansion*, 24(3), 744–785. <https://doi.org/10.29303/agrimansion.v24i3.1584>
- St Maryam, H., & Syarkawi, M. T. (2022). Analisis Pengaruh Ojek Online di Wilayah Perkotaan terhadap Moda Transportasi Umum di Kota Makassar. *Jurnal Konstruksi: Teknik, Infrastruktur dan Sains*, 1(10), 12–22.
- Susilawati, I., Tamrin, A., & Nasrullah, M. (2023). Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 101–114.
- Syamsu Rijal, & Thamrin Tahir. (2022). Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(1), 262–276. <https://doi.org/10.26858/je3s.v3i1.103>
- Yanuar, H., Fauziah, R., & Saleh, M. (2023). Ketimpangan Wilayah dalam Kawasan Mamminasata: Analisis Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Urban dan Regional*, 7(2), 55–70.
-